

JURNAL ILMIAH

**MODEL EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

***REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET POLICY
EVALUATION MODEL OF TASIKMALAYA DISTRICT***

Oleh

**USMAN KUSMANA
NPM: 199020021**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan APBD di tingkat daerah sering kali belum optimal dan masih berorientasi pada aspek administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan APBD Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi kinerja anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi berbasis teknologi informasi, serta kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik dan partisipasi dalam pengelolaan APBD, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan legislatif. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen APBD dan publikasi resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang relatif rendah (60%), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran yang terbatas (30%), rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (30%), serta minimnya transparansi pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan APBD perlu dilakukan secara multidimensional dan berbasis kinerja.

Penelitian ini menawarkan model evaluasi kebijakan APBD yang integratif sebagai kontribusi ilmiah dan praktis, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran dan kualitas tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, APBD, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, Kemandirian Fiskal.

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan APBD di tingkat daerah sering kali belum optimal dan masih berorientasi pada aspek administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan APBD Kabupaten Tasikmalaya yang komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi kinerja anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi berbasis teknologi informasi, serta kemandirian fiskal daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik serta partisipasi dalam pengelolaan APBD, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparatur pemerintah daerah dan legislatif. Data sekunder diperoleh dari dokumen APBD dan publikasi resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, yang tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang relatif rendah (60%), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran yang terbatas (30%), rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (30%), serta minimnya transparansi pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan APBD perlu dilakukan secara multidimensional dan berbasis kinerja.

Penelitian ini menawarkan model evaluasi kebijakan APBD yang integratif sebagai kontribusi ilmiah dan praktis, yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran serta kualitas tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, APBD, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, Kemandirian Fiskal.

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan jeung Belanja Daerah (APBD) mangrupa instrumén utama kawijakan fiskal daerah anu miboga peran strategis dina ngarajong palaksanaan pamaréntahan sarta ngahontal tujuan pangwanganan daerah. Sanajan kitu, efektivitas palaksanaan kawijakan APBD di tingkat daerah mindeng can optimal sarta masih kénéh museur kana aspek administratif. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun ngamekarkeun model évaluasi kawijakan APBD Kabupaten Tasikmalaya anu komprehensif ku cara ngahijkeun dimensi kinerja anggaran, partisipasi masarakat, transparansi dumasar kana téknologi informasi, sarta kamandirian fiskal daerah.

Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta pendekatan campuran (mixed methods), ku ngahijkeun métode kuantitatif jeung kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkeun ngaliwatan survéy ka masarakat pikeun ngukur tingkat kapuasan kana palayanan publik sarta partisipasi dina pangelolaan APBD, sedengkeun data kualitatif dicandak tina wawancara jero jeung para pamangku kapentingan, kaasup aparat pamaréntah daerah jeung legislatif. Data sekundér dicandak tina dokumén APBD jeung publikasi resmi pamaréntah daerah. Analisis data dilaksanakeun sacara déskriptif jeung tématik.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén efektivitas panggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya can optimal, anu katémbong tina tingkat kapuasan masarakat kana palayanan publik anu masih handap (60%), partisipasi masarakat dina perencanaan jeung pangawasan anggaran anu kawates (30%), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kana total panghasilan daerah anu rendah (30%), sarta minimna transparansi pangelolaan anggaran dumasar kana téknologi informasi. Ieu kaayaan nuduhkeun yén évaluasi kawijakan APBD perlu dilaksanakeun sacara multidimensi sarta dumasar kana kinerja.

Panalungtikan ieu nawarkeun model évaluasi kawijakan APBD anu integratif minangka kontribusi ilmiah jeung praktis, anu dipiharep bisa jadi rujukan pikeun pamaréntah daerah dina ningkatkeun efektivitas kawijakan anggaran sarta kualitas tata kelola kauangan daerah anu museur kana kapentingan masarakat.

Kecap Konci: Évaluasi Kawijakan, APBD, Partisipasi Masarakat, Transparansi Anggaran, Kamandirian Fiskal.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, APBD menjadi cerminan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kualitas APBD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, karena anggaran tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan, tetapi juga akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki struktur APBD yang didominasi oleh belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, total APBD Kabupaten Tasikmalaya mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan proporsi belanja pelayanan dasar yang relatif besar. Meskipun demikian, capaian indikator pembangunan daerah belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan efektivitas implementasi kebijakan, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan APBD secara lebih sistematis dan komprehensif.

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menilai keberhasilan, kegagalan, serta dampak kebijakan terhadap sasaran yang dituju. Menurut Dunn (2016), evaluasi kebijakan berfungsi untuk menghasilkan informasi mengenai nilai dan kinerja suatu kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam konteks APBD, evaluasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek serapan anggaran, tetapi juga pada ketercapaian output dan outcome pembangunan daerah. Namun, berbagai

penelitian menunjukkan bahwa evaluasi APBD di tingkat daerah masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Aspek partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan anggaran daerah. Haryanto (2020) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran mampu meningkatkan efektivitas kebijakan serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Partisipasi publik juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, yang merupakan prinsip utama good governance. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalitas dan belum terintegrasi secara optimal dalam mekanisme evaluasi kebijakan anggaran daerah.

Selain partisipasi publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi isu strategis dalam pengelolaan dan evaluasi APBD. Penerapan sistem informasi keuangan daerah, seperti e-budgeting, dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengendalian anggaran. Penelitian Kurniawan dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa implementasi e-budgeting di beberapa pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen pemerintah daerah.

Dari sisi kemandirian fiskal, Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang berada pada kisaran 30%. Menurut Halim (2017), rendahnya PAD mencerminkan keterbatasan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan berimplikasi pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi kebijakan anggaran yang mampu menilai sejauh mana APBD berperan dalam mendorong penguatan kapasitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat diidentifikasi research gap berupa belum adanya model evaluasi kebijakan APBD yang secara terintegrasi mengombinasikan aspek kinerja anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi berbasis teknologi, serta kemandirian fiskal daerah, khususnya pada konteks Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diharapkan dapat menjadi instrumen analitis dalam menilai efektivitas kebijakan anggaran serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis kinerja dan berorientasi pada pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan Publik dan Anggaran Daerah

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja, dampak, serta keberlanjutan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2016) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas analitis yang bertujuan menghasilkan informasi mengenai nilai dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, evaluasi kebijakan APBD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut Bastian (2019), evaluasi anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga harus menilai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Evaluasi APBD yang berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, sekaligus menilai kontribusi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan APBD harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek keuangan, kelembagaan, dan dampak kebijakan.

Model Logika (Logic Model) dalam Evaluasi Kebijakan APBD

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam evaluasi kebijakan publik adalah Model Logika (Logic Model). Model ini menggambarkan hubungan sistematis antara input, proses, output, outcome, dan impact dari suatu kebijakan atau program. McLaughlin dan Jordan (2010) menyatakan bahwa Logic Model membantu evaluator memahami hubungan sebab-akibat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga memudahkan penilaian efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Dalam konteks APBD, input mencakup sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan regulasi pendukung; proses meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program; output berupa realisasi kegiatan dan layanan publik; sedangkan outcome mengacu pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan Logic Model, evaluasi kebijakan APBD tidak hanya berhenti pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga menilai sejauh mana anggaran mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan evaluasi kebijakan anggaran berbasis hasil (*result-oriented evaluation*).

Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Cornwall (2008) memandang partisipasi masyarakat sebagai proses keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dalam pengelolaan anggaran daerah, partisipasi masyarakat menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

Partisipasi masyarakat dalam APBD umumnya diwujudkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pengawasan sosial, serta akses terhadap informasi anggaran. Haryanto (2020) menegaskan

bahwa partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan APBD perlu menilai kualitas partisipasi masyarakat, tidak hanya dari sisi kuantitas keterlibatan, tetapi juga dari sejauh mana masukan masyarakat diakomodasi dalam kebijakan anggaran.

Penelitian empiris oleh Sari dan Hidayah (2019) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan mekanisme partisipatif dalam pengelolaan anggaran memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi serta kinerja pelayanan publik yang lebih baik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam evaluasi kebijakan APBD, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

Transparansi dan Teknologi Informasi dalam Evaluasi APBD

Transparansi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa transparansi anggaran memungkinkan masyarakat untuk mengetahui arah kebijakan dan penggunaan anggaran daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam era digital, transparansi pengelolaan APBD semakin didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian Prabowo dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, seperti e-budgeting dan e-planning, mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sistem ini juga memudahkan proses evaluasi kebijakan APBD karena data keuangan dapat diakses dan dianalisis secara lebih cepat dan akurat. Namun, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemandirian Fiskal Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah dalam era otonomi daerah. Halim (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar kemampuan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan APBD perlu memperhatikan sejauh mana anggaran daerah mampu mendorong peningkatan PAD.

Menurut Rahayu (2021), daerah yang menerapkan kebijakan inovatif dalam pengelolaan PAD, seperti optimalisasi pajak daerah, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal, cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, evaluasi kebijakan APBD perlu menilai efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung sektor-sektor potensial yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Sintesis Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan APBD memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Model evaluasi yang efektif harus mampu mengintegrasikan Logic Model, partisipasi masyarakat, transparansi berbasis teknologi informasi, serta kemandirian fiskal daerah. Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengembangkan model evaluasi kebijakan APBD secara integratif dengan konteks spesifik daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan mengembangkan Model Evaluasi Kebijakan APBD Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis kinerja, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini

dipilih untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai evaluasi kebijakan APBD di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan masyarakat.

Survei akan dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didanai oleh APBD, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti laporan APBD, laporan kinerja, dan data statistik dari BPS dan Dinas Pendapatan Daerah. Data ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Selanjutnya, analisis kualitatif akan dilakukan terhadap hasil wawancara dengan stakeholder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan APBD. Teknik analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam tahap akhir, hasil dari analisis kuantitatif dan kualitatif akan digabungkan untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan APBD yang komprehensif. Model ini akan mencakup indikator-indikator yang relevan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan model ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan APBD dan Kepuasan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didanai APBD, di mana hanya sekitar 60% responden menyatakan puas. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat belum merasakan manfaat yang maksimal dari alokasi anggaran daerah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan anggaran dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, Dunn (2016) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan dan menghasilkan outcome yang diharapkan. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat mengindikasikan bahwa alokasi dan implementasi anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa evaluasi kebijakan APBD tidak cukup hanya menilai tingkat serapan anggaran, tetapi juga harus mengkaji kualitas layanan publik yang dihasilkan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan APBD

Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan APBD masih tergolong rendah. Hanya sekitar 30% masyarakat yang merasa terlibat dalam proses tersebut. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap kebijakan anggaran daerah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Hidayah (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dapat menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik.

Cornwall (2008) juga menegaskan bahwa partisipasi yang bersifat formalitas tanpa pemberdayaan substantif cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, mekanisme partisipasi seperti Musrenbang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang dialog yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator utama dalam model evaluasi kebijakan APBD. Partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian antara kebijakan anggaran dan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Kemandirian Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari aspek kemandirian fiskal, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi PAD hanya mencapai sekitar 30% dari total pendapatan daerah, yang mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Menurut Halim (2017), rendahnya PAD menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan lemahnya inovasi kebijakan fiskal daerah. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa sektor potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti sektor pariwisata berbasis budaya dan alam serta industri lokal dan UMKM. Evaluasi kebijakan APBD perlu diarahkan untuk menilai sejauh mana alokasi anggaran mampu mendorong pengembangan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan anggaran yang inovatif dan berbasis potensi lokal dapat meningkatkan

kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, model evaluasi kebijakan APBD yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan kemandirian fiskal sebagai dimensi penting dalam menilai keberhasilan kebijakan anggaran daerah.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari temuan bahwa hanya sekitar 40% responden yang mengetahui informasi terkait penggunaan anggaran daerah. Minimnya akses informasi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menyediakan informasi anggaran yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat masih belum optimal.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa transparansi anggaran merupakan prasyarat utama akuntabilitas publik. Penelitian Prabowo dan Setiawan (2020) membuktikan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, seperti e-budgeting, mampu meningkatkan transparansi dan mempermudah proses evaluasi kebijakan anggaran. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya tantangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, temuan ini memperkuat urgensi penerapan sistem e-budgeting dan e-planning sebagai bagian integral dari model evaluasi kebijakan APBD. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas.

Implikasi Model Evaluasi Kebijakan APBD

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan APBD Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor

utama, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, partisipasi masyarakat, kemandirian fiskal daerah, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Temuan ini mengonfirmasi bahwa evaluasi kebijakan APBD perlu dilakukan secara multidimensional dan tidak parsial.

Model evaluasi kebijakan APBD yang diusulkan dalam penelitian ini mengintegrasikan keempat dimensi tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja kebijakan anggaran daerah. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan perbaikan kebijakan anggaran secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan APBD di Kabupaten Tasikmalaya masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat merupakan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran daerah.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan APBD melalui forum-forum diskusi dan sosialisasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, seperti pariwisata dan industri lokal.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan APBD dan mencapai tujuan

pembangunan daerah yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang evaluasi kebijakan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis* (5th ed.). New York: Routledge.
- Halim, A. (2017). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (2010). *Using logic models*. San Francisco: Jossey-Bass.

B. Jurnal Nasional

- Haryanto. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Kurniawan, T., & Rahman, A. (2021). Implementasi e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 67–82.
- Prabowo, H., & Setiawan, B. (2020). Sistem informasi keuangan daerah dan transparansi pengelolaan anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 101–115.

Rahayu, S. (2021). Inovasi kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 23–38.

Sari, D. P., & Hidayah, N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah dan pengaruhnya terhadap kepuasan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 89–102.

C. Jurnal Internasional

Cornwall, A. (2008). Unpacking “participation”: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
<https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>

OECD. (2019). Budgeting and public expenditures in OECD countries. *OECD Journal on Budgeting*, 18(2), 1–28.

World Bank. (2018). Enhancing public sector performance through results-based budgeting. *World Bank Policy Research Working Paper*, 8574, 1–32.

D. Regulasi dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. (2022). *Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2022*. Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.